



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 106 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS OTORISATOR DAN
ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN

BPKdO

1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna memperlancar tugas-tugas pemerintahan di Daerah dan peningkatan tertib administrasi dipandang perlu adanya pemisahan atau penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas - perlu menunjuk Pejabat tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai Otorisator dan Ordonatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 22 tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992 ;

/ MIKUSKA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKSANA -
KAN TUGAS OTORISATOR DAN ORDONATUR PADA PEMERINTAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melaksana
nakan tugas Otorisator dan Ordonatur dalam lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana
tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 de
ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila
ternyata terdapat kikeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 13 April 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

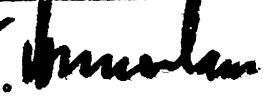
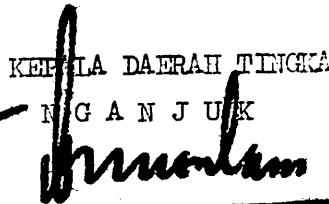
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Ith. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. " Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. " Direktur Jendral Pemerintahan-Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. " Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. " Pembantu Gubernur di Kediri,
7. " Kepala Kantor Perbendaharaan - dan Kas Negara di Kediri.
8. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

10. Sdr. Pembantu . . .

10. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk.
 11. " Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 12. " Pembantu Bupati se Kabupaten - Nganjuk .
 13. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen-
Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 106 TAHUN 1991
TANGGAL : 13 APRIL 1991

Nomor	Nama	Jabatan	Uraian tugas/we wenang yang di berikan dalam - Keputusan ini	Tanda tangan
1.	Drs. IBNU SALAM	Bupati Kepala Daerah	Otorisator	1. 
2.	WARSITO NIP 510003684	Kepala Bagian Keuang	Ordonatur	2. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM